

ANALISIS PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA DI INDONESIA

Sunartono

Pusat Pengkajian Kebijakan Peningkatan Daya Saing, BPPT, Jakarta

Abstract

The problems of labor have influenced of many factors as such global market, regulation and government policy. Indicators of labor that a number used up till now were considered have some weakness. The result of this analysis was indicated the presents of sector performance variation and labor change viewed according to economic sectors. The demographic pressure to labor supply can be describe that population grow 1,7 percent per year at 2000-2005 period. Estimated the number higher that population grow of the time 2000-2005 is 1,3 percent per year and 2005-2009 is 1,1 percent per year. Many labor policy can be implemented to development and improve the skill and knowledge. A lot of the labor problems is multidimension properties can be solve by multidimension approaches. A number of external and internal factors of labor were also showed the various effect based on the many sectors. Therefore, to improve capacity of each sector will be needed policy intervention which to take care of the such as variation.

Kata kunci : Peluang kerja, sektoral

1. PENDAHULUAN

Salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh program pembangunan nasional adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan memperluas landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran itu, Proptenas menggunakan sejumlah indikator yang mencakup antara lain pertumbuhan ekonomi yang meningkat secara bertahap, sehingga mencapai 6-7 persen, inflasi terkendali sekitar 3-5 persen, menurunkan tingkat pengangguran menjadi sekitar 5,1 persen, dan menurunnya jumlah penduduk miskin (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2007).

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sangat besar dan kompleks. Besar karena menyangkut jutaan jiwa tenaga kerja. Kompleks karena masalah tenaga kerja mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah untuk dirumuskan (Tobing, 2006). Faktor demografis mempengaruhi jumlah dan komposisi angkatan kerja. Indonesia cukup berhasil dalam menurunkan angka kelahiran dan kematian secara berkesinambungan. Namun, hal ini justru berdampak pada pertumbuhan penduduk usia kerja yang jauh lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk secara keseluruhan (Ananta, 1990).

Tekanan demografis terhadap sisi penawaran (*supply side*) tenaga kerja dapat digambarkan sebagai berikut. Pertumbuhan penduduk usia kerja selama kurun waktu 2000-2005 diperkirakan mencapai 1,7% per tahun. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penduduk secara keseluruhan selama periode 2000-2005 dan 2005-2009 yang diperkirakan masing-masing 1,3% dan 1,1% per tahun (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2007). Kecenderungan seperti ini adalah akibat dari penurunan angka kelahiran dan kematian secara berkesinambungan. Hal ini memiliki konsekuensi kebijakan yang jelas. Strategi pengurangan penawaran tenaga kerja melalui penurunan laju pertumbuhan penduduk tidak akan efektif lagi.

Untuk mengatasi tekanan terhadap melonjaknya penawaran tenaga kerja seperti di atas, maka diperlukan penciptaan peluang kerja dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Tulisan ini bertujuan menganalisis seberapa besar peluang kerja dapat ditingkatkan dalam beberapa tahun ke depan.

2. BAHAN DAN METODE

Secara teoretis, ada tiga cara untuk menciptakan peluang kerja dalam jangka panjang. Pertama, memperlambat laju pertumbuhan penduduk yang diharapkan dapat menekan laju pertumbuhan sisi penawaran tenaga kerja. Akan tetapi, seperti

dikemukakan di atas, cara ini tidak memadai bagi Indonesia karena angka kelahiran memang tidak relatif rendah dan dampaknya terhadap pertumbuhan tenaga kerja kurang signifikan dalam jangka pendek. Kedua, meningkatkan intensitas pekerja dalam menghasilkan *output* (*labour intensity of output*). Namun, dalam jangka panjang cara ini tidak selalu berhasil karena tidak senantiasa kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Ketiga, melalui pertumbuhan ekonomi. Cara ini bukan tanpa kualifikasi karena secara empiris terbukti bahwa pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja tidak terdapat hubungan otomatis atau niscaya, tetapi justru tantangannya menjadi riil, karena hubungan yang tidak otomatis itu, maka peranan pemerintah menjadi strategis dan krusial untuk merancang strategi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan ramah terhadap ketenagakerjaan (*employment friendly growth*) melalui dua elemen strategi berikut :

- a. Strategi dan kebijakan yang membuat proses pertumbuhan ekonomi menjadi lebih memperhatikan aspek ketenagakerjaan.
- b. Tindakan yang dibutuhkan untuk menciptakan lapangan kerja tambahan melalui program-program penciptaan lapangan kerja secara langsung.

Merujuk pada ketiga cara di atas, maka berikut ini akan dianalisis sejauhmana peluang kerja di berbagai sektor dapat ditingkatkan dalam beberapa tahun ke depan.

Di dalam melakukan analisis peningkatan peluang kerja sektoral, metode yang dipergunakan adalah :

- a. Metode pengumpulan data dan informasi adalah survei sekunder ketenagakerjaan berupa hasil Survei Angkatan Kerja Nasional tahun 2007 dan Dokumen Rencana Tenaga kerja Nasional Tahun 2004-2009 serta dilengkapi dengan beberapa referensi yang relevan untuk mendukung analisis masalah.
- b. Metode *analisis deskriptif*, yaitu mendeskripsi data dan informasi yang menjadi dasar analisis dari permasalahan yang dikembangkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kebijakan Umum Ketenagakerjaan

Masalah-masalah ketenagakerjaan bersifat multidimensi, mempengaruhi, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor dengan pola hubungan yang kompleks, sehingga penyelesaiannya menuntut arah kebijakan dan pendekatan yang multidimensi pula. Masalah ketenagakerjaan yang berskala

besar, kompleks, serta masih didominasi oleh tenaga kerja pertanian dan sektor informal, memerlukan kebijakan pasar kerja yang lentur (*labour market flexibility*). Melalui kebijakan itu, pihak pengusaha diharapkan dapat mengatasi permasalahan ketenagakerjaan internal melalui penyelesaian tingkat upah, bukan dengan pemutusan hubungan kerja yang berdampak sangat luas. Kebijakan semacam itu diharapkan dapat mempersempit tingkat kesenjangan upah antara lapangan usaha formal dan sektor informal, menekan laju kenaikan pengangguran terbuka, serta menurunkan angka kemiskinan.

Perhatian lebih besar perlu diberikan kepada jenis-jenis industri manufaktur yang dapat mendorong pertumbuhan yang ramah tenaga kerja. Industri tersebut bercirikan tidak terlalu tergantung pada bahan impor (yakni industri-industri yang berbasis alamiah) atau berorientasi pasar domestik yang dapat memberikan *input* bagi industri-industri yang sangat bergantung pada impor. Sekitar 90% industri di Indonesia diperkirakan termasuk kategori ini, sehingga jelas merupakan lapangan usaha andalan dalam menyediakan lapangan kerja setelah pertanian. Perlu pula diperhatikan, bahwa upaya ke arah ini dalam praktiknya menghadapi sejumlah kendala, mulai dari proses permohonan izin usaha, permohonan kredit bank, hingga sejumlah retribusi pada tingkat propinsi atau kabupaten/kota. (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2007).

Sebelum perekonomian mencapai tingkat perkembangan dimana semua pelaku pasar terlibat dalam kelembagaan perekonomian modern, maka lapangan usaha informal dapat diandalkan untuk menyerap tenaga kerja. Kekuatan lapangan usaha informal adalah kemudahan untuk menyerap tenaga kerja dan yang lebih penting di dalam era globalisasi sekarang ini lapangan usaha informal tidak terkait secara langsung oleh dampak negatif globalisasi. Dalam era otonomi daerah dewasa ini, tantangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam bidang ketenagakerjaan adalah melakukan analisis situasi, merencanakan, serta memonitor proses pembangunan yang bertumpu pada ketenagakerjaan. Dalam kaitan ini, sistem informasi ketenagakerjaan akan sangat membantu sebagai salah satu alat dalam pengambilan kebijakan.

Untuk menghindari dampak negatif globalisasi tidak harus melalui pasar kerja secara langsung, tetapi bisa melalui kebijakan tidak langsung seperti pemberian prioritas terhadap pendidikan, regulasi finansial, dan manajemen ekonomimakro yang kondusif.

Selama perekonomian nasional masih terbatas menyediakan peluang kerja dalam jumlah besar, maka pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri masih dianggap strategis. Namun, program ini harus dibarengi dengan kebijakan menyeluruh dan terpadu untuk memberikan perlindungan kepada mereka.

3.2. Situasi Pasar Tenaga Kerja

Dari sekitar 148,7 juta jiwa penduduk usia kerja tahun 2002, terdapat 100,8 juta orang atau 67,8% angkatan kerja, dimana dari angka ini jumlah angkatan kerja yang menganggur atau tidak tertampung dalam pasar kerja mencapai 9,1 juta orang (9,1%). Di sisi lain, dari sekitar 91,6 juta orang angkatan kerja yang bekerja, paling tidak 12,0 juta jiwa atau 13,1% digolongkan setengah menganggur karena mereka bekerja di bawah waktu normal dan masih mencari-cari kerja. (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2007).

Pekerja Indonesia masih sangat terkonsentrasi pada profesi petani dan tenaga kerja produksi. Sedangkan profesi-profesi lain yang memiliki produktivitas tinggi seperti profesional/teknisi dan manajerial/administrasi masih sangat rendah proporsinya. Hal ini berlaku bagi semua lapangan usaha, termasuk industri pengolahan. Lebih dari 90% pekerja di industri pengolahan berprofesi sebagai tenaga kerja produksi. Selain itu, tingkat pendidikan pekerja Indonesia relatif masih rendah, dimana proporsi pekerja yang berpendidikan SLTP atau lebih rendah sekitar 70% (Supenti, 2004).

Hingga kini, sekitar dua per tiga pekerja bekerja atau berusaha di sektor informal, suatu sektor yang bercirikan berskala serba kecil dilihat dari modal maupun tenaga kerja yang seringkali masih memiliki hubungan keluarga, serta memiliki mobilitas yang tinggi dalam arti mudah berubah bidang kegiatannya. Dengan ciri semacam itu, maka sektor informal sulit diintervensi. Karena sifatnya yang mudah dimasuki, maka sektor informal menjadi semacam "penyangga" yang strategis untuk menampung tenaga kerja "berlebih" yang tidak tertampung di sektor formal (Supenti, 2004).

Kenyataan bahwa secara umum ada kenaikan pekerja di sektor formal, sama sekali tidak mengurangi arti pentingnya sektor informal yang mendominasi pasar kerja Indonesia. Kenyataan ini tidak dapat diabaikan dalam rancangan arus utama kebijakan makro dan perencanaan tenaga kerja. Walaupun demikian, dalam praktiknya hal itu tidak mudah diaplikasikan karena dua alasan sederhana. *Pertama*, karakteristik pekerja sektor informal yang marginal sukar diintervensi secara langsung, *Kedua*, kebijakan yang memperhatikan

kepentingan pekerja sektor formal dan pekerja sektor informal sekaligus masih sulit dirumuskan.

Perubahan struktural juga terjadi dalam bidang ketenagakerjaan, sebagaimana terlihat dari pertambahan absolut jumlah tenaga kerja di sektor nonpertanian. Selama kurun waktu 1990-1997, tenaga kerja sektor nonpertanian meningkat lebih dari 16,5 juta orang, sebaliknya tenaga kerja di sektor pertanian, barangkali untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia, turun lebih dari 6,7 juta orang. Pertambahan tenaga kerja nonpertanian sebagian besar terjadi di sektor perdagangan, jasa, industri, dan konstruksi. Selama periode tadi, tenaga kerja nonpertanian secara keseluruhan tumbuh sekitar 6,0% per tahun.

Dalam pasar kerja Indonesia, terdapat semacam *mismatch* antara lulusan pendidikan dan dunia kerja. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan indeks upah tenaga terdidik (di atas SLTA) relatif terhadap tenaga kerja tak terdidik (di bawah SD), terutama dalam dua tahun terakhir. Kenaikan indeks tersebut mengindikasikan :

- a. Permintaan tenaga kerja terdidik lebih cepat daripada permintaan tenaga kerja secara keseluruhan.
- b. Permintaan tenaga kerja terdidik lebih cepat dibandingkan penawaran tenaga kerja terdidik.

Implikasinya antara lain, ketimpangan upah meningkat, permintaan dan kelangkaan tenaga kerja tidak terpenuhi, dan yang mengherankan adalah angka penganggur terdidik relatif tinggi, terutama di daerah perkotaan.

Aspek lain mengenai upah buruh yang perlu dicermati adalah bahwa perbedaan tingkat upah antara pekerja formal dan informal cenderung melebar sejak kuartal pertama tahun 2000. Gejala ini tampaknya menyerupai pola "Amerika Latin", yaitu suatu gejala yang tidak menguntungkan bagi kepentingan pekerja secara keseluruhan.

Menekan angka penganggur sehingga mencapai tingkat sebagaimana ditargetkan Proenas jelas memerlukan upaya ekstra keras dan sistematis. Angka penganggur sampai tahun 2009 diperkirakan masih sekitar 7,5 juta orang atau 5,5% dari total angkatan kerja (BPS, 2007).

Seperti halnya target menurunkan angka penganggur, target Proenas untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi juga diramalkan jauh dari harapan, karena pada kurun 2005-2009 angka rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun diramalkan hanya sekitar 6%.

Masalah setengah penganggur juga tidak dapat diabaikan, terutama jika fokusnya diarahkan pada daerah perdesaan. Total pekerja yang berkategori setengah penganggur pada tahun 2002 berjumlah

12,0 juta orang atau 13,1% dari total penduduk yang bekerja (BPS, 2007).

3.3. Prospek Ketenagakerjaan Sampai Tahun 2009

Dalam penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional 2004-2009, penghitungan proyeksi penduduk menggunakan asumsi turunnya tingkat kelahiran dan tingkat kematian. Diasumsikan bahwa pada tahun 2010 *Total Fertility Rate (TFR)* mencapai 2,15 dan angka harapan hidup wanita mencapai 70 tahun. Proyeksi tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) didasarkan pada hasil proyeksi penduduk dengan asumsi bahwa TPAK 2010 mengikuti perkembangan TPAK selama kurun waktu 1990-2000, dengan pola pertumbuhan linier. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, angkatan kerja diperkirakan tumbuh jauh lebih cepat dari laju pertumbuhan penduduk secara keseluruhan.

Hasil proyeksi menunjukkan jumlah penduduk tahun 2009 mencapai 228,9 juta jiwa, sekitar 168,9 juta jiwa (73,7%) di antaranya adalah penduduk usia kerja. Sekitar 116,5 juta jiwa (69,0%) dari penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja. Adapun angkatan kerja yang menganggur diperkirakan mulai berkurang sejak tahun 2006, sehingga pada tahun 2009 jumlahnya mencapai sekitar 7,5 juta jiwa (5,5%) dari angkatan kerja. Secara keseluruhan prospek ketenagakerjaan terdapat pada Tabel 1.

Secara keseluruhan sisi permintaan tenaga kerja masih akan lebih rendah dari yang ditawarkan, sehingga masih tercipta penganggur sekitar 6-11 persen dari total angkatan kerja. Dalam kurun waktu 2003-2005 terserap sekitar 6,1

juta tenaga kerja, sedangkan selama periode 2005-2009 diperkirakan terserap sekitar 12,7 juta tenaga kerja. Selain sektor pertanian, sektor lain yang berpotensi menyerap tenaga kerja adalah industri, perdagangan, dan jasa.

3.4. Penciptaan Kesempatan Kerja Sektoral

Di dalam memperkirakan peluang kerja, asumsi dasar yang dipergunakan adalah pertumbuhan jumlah penduduk, usia angkatan kerja, dan pertumbuhan kegiatan di setiap sektor. Hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel.2.

Adapun sektor-sektor yang mempunyai kontribusi di dalam penciptaan lapangan kerja dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Lapangan usaha pertanian dalam kurun 2005-2009. Pertumbuhan nilai tambah lapangan usaha ini rata-rata masih sekitar 2,7% per tahun, dengan penciptaan tambahan kesempatan kerja sebanyak 1,4 juta orang, sehingga total penduduk yang bekerja di lapangan usaha ini pada tahun 2009 akan berjumlah 42,4 juta orang. Perkiraan kesempatan kerja ini tidak akan dapat direalisasikan apabila kebijakan, strategi, dan program pengembangan lapangan usaha pertanian tidak berbasis ketenagakerjaan.
2. Lapangan usaha pertambangan dan penggalian, yang mencakup pertambangan migas, pertambangan nonmigas, dan penggalian. Dengan asumsi pertumbuhan nilai tambah lapangan usaha ini selama periode 2005-2009 rata-rata 5,0% setahun, maka daya serap tenaga kerja oleh sektor ini hanya 90.000 orang.

Tabel. 1. Perkiraan Penduduk, Angkatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengangguran, 2003-2009

Uraian	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Total penduduk (ribu jiwa)	213.734	216.3721	219.010	221.496	223.962	226.468	226.954
Penduduk Usia Kerja (ribu jiwa)	151.936	154858	157.780	160.550	163.320	166.090	168.880
Angkatan Kerja (ribu jiwa)	103.416	105.678	107.940	110.064	112.228	114.372	116.516
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,02	4,43	5,01	5,29	5,91	6,50	7,14
Penganggur (ribu jiwa)	11.359	11.630	11.630	11.100	10.287	9.118	7.547
Persentase Terhadap Angkatan Kerja (%)	11,0	11,0	10,8	10,8	9,2	8,0	5,5

Sumber : Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2007.

Tabel. 2. Perkiraan Penciptaan Peluang Kerja di Setiap Sektor, 2003-2009

Uraian	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Total penduduk (ribu jiwa)	213.734	216.3721	219.010	221.496	223.962	226.468	226.954
Penduduk Usia Kerja (ribu jiwa)	151.936	154858	157.780	160.550	163.320	166.090	168.880
Angkatan Kerja (ribu jiwa)	103.416	105.678	107.940	110.064	112.228	114.372	116.516
Penduduk Bekerja (ribu jiwa)	92.057	94.048	96.310	99.984	101.941	105.254	108.969

1. Pertanian	40.309	40.591	40.995	41.372	41.730	42.054	42.356
2. Pertambangan dan Penggalian	642	654	688	707	729	752	776
3. Industri Pengolahan	12.148	12.451	12.880	13.346	13.852	14.403	15.006
4. Listrik, Gas dan Air Minum	192	206	218	234	253	275	301
5. Konstruksi	4.322	4.410	4.518	4.635	4.764	4.914	5.167
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	17.785	18.080	18.431	19.121	19.942	20.880	21.884
7. Pengangkutan dan Telekomunikasi	4.939	5.183	5.483	5.852	6.296	6.888	7.547
8. Bank, Lembaga Keuangan lainnya	1.069	1.171	1.295	1.442	1.623	1.849	2.131
9. Jasa-Jasa	10.672	11.263	11.794	12.276	12.752	13.260	13.802
Penganggur (ribu jiwa)	11.359	11.630	11.630	11.100	10.287	9.118	7.547
% Terhadap Angkatan Kerja	11,0	11,0	10,8	10,8	9,2	8,0	5,5

Sumber : Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2007.

3. Dengan asumsi sektor industri pengolahan diprediksi tumbuh 6,2% per tahun sepanjang periode 2005-2009, maka lapangan usaha ini diharapkan mampu menyediakan 2,1 juta kesempatan kerja baru, sehingga pada tahun 2009 sekitar 15,0 juta orang bekerja di sektor ini. Untuk mewujudkan target ini, beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain (a) lebih mengintensifkan penyebaran informasi di tingkat daerah, (b). menyiapkan tenaga kerja yang trampil dan dapat bersaing di pasar kerja dengan memperhatikan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, (c) penyederhanaan birokrasi, prosedur perizinan, dan prosedur ekspor-impor, dan (d) upaya menstabilkan harga, nilai tukar rupiah dan pajak (Primiana, 2004).
4. Peranan sektor listrik, gas, dan air bersih dalam penciptaan kesempatan kerja cukup besar, yakni diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 83.000 orang, dengan asumsi nilai tambah sektor ini tumbuh 6,4% per tahun.
5. Selama jangka waktu 2005-2009 nilai tambah lapangan usaha konstruksi diperkirakan naik sekitar 5,4% setahun, dan diharapkan dapat menciptakan sekitar 649.000 kesempatan kerja baru, sehingga pada tahun 2009 di lapangan usaha ini akan berjumlah sekitar 5,2 juta orang.
6. Hingga tahun 2009, nilai tambah sektor perdagangan, hotel, dan restoran diprediksi akan tumbuh sekitar 5,2% setiap tahun. Dengan angka sebesar ini, diperkirakan akan terserap sekitar 3,5 juta tenaga kerja baru, suatu angka yang sangat besar bila dibandingkan dengan daya serap lapangan usaha lainnya.
7. Dalam kurun 2005-2009 pertumbuhan nilai tambah lapangan usaha pengangkutan dan komunikasi diperkirakan sebesar 6,2% per tahun dan diharapkan dapat menciptakan kesempatan kerja sekitar 2,1 juta orang,

sehingga pada tahun 2009 diperkirakan akan terdapat 7,5 juta tenaga kerja di sektor ini.

8. Kontribusi sektor keuangan dan perbankan terhadap pembentukan PDB maupun penciptaan kesempatan kerja secara langsung masih relatif kecil. Namun demikian, posisinya amat strategis bagi pengembangan lapangan usaha lain dalam sektor rill, sehingga secara tidak langsung berpengaruh terhadap penciptaan kesempatan kerja.
9. Sumbangan lapangan usaha jasa-jasa dalam penciptaan kesempatan kerja relatif besar. Dalam kurun waktu 2005-2009, peranan sektor ini dalam penciptaan kesempatan kerja diperkirakan terus meningkat, sejalan dengan pertumbuhan nilai tambahnya yang diperkirakan mencapai 9,4% per tahun. Pada tahun 2009, diperkirakan akan terdapat sebanyak 13,8 juta orang yang bekerja pada lapangan usaha ini.

4. KESIMPULAN

Masalah ketenagakerjaan memang sangat luas dan kompleks. Masalah ketenagakerjaan mengandung dimensi ekonomis, dimensi sosial kesejahteraan, dan dimensi sosial politik. Dari segi dimensi ekonomis, pembangunan ketenagakerjaan mencakup penyediaan tenaga-tenaga ahli dan terampil sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Untuk itu harus dibangun sistem pelatihan kerja, sistem informasi pasar kerja, dan sistem antarkerja, baik lokal, antardaerah, maupun ke luar negeri. Perluasan kesempatan kerja juga merupakan dimensi ekonomis ketenagakerjaan, karena melalui kesempatan kerja pertumbuhan ekonomi diciptakan sekaligus memberikan penghasilan dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Penciptaan kesempatan kerja dilakukan dengan menumbuhkan dunia usaha melalui berbagai kebijakan, antara lain di bidang produksi, moneter, fiskal, distribusi, harga dan upah, ekspor-

impor, serta bidang ketenagakerjaan itu sendiri. Dengan demikian, setiap pengambilan kebijakan di bidang perluasan kesempatan kerja dan ketenagakerjaan pada umumnya, selalu mempunyai dimensi ekonomis politis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananta, Aris. 1990. "Modal Manusia dalam Pembangunan Ekonomi," dalam A. Ananta (peny.), *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Lembaga Demografi FEUI, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2007. *Survei Angkatan Kerja Nasional*, Jakarta.
- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2007. *Rencana Tenaga Kerja Nasional 2004-2009*, Jakarta.
- Primiana, Ina. 2004. *Daya Saing : Isu Strategis Tahun 2004*, Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Supenti, Titin. 2004. "Masalah Ketenagakerjaan Berdasarkan Konsep Penganggur dan Setengah Penganggur," *Warta Ketenagakerjaan*, Edisi 9 dan 10, Jakarta.
- Tobing, Elwin. 2006. *Masalah Struktural Peningkatan Kesempatan Kerja*, Jakarta.